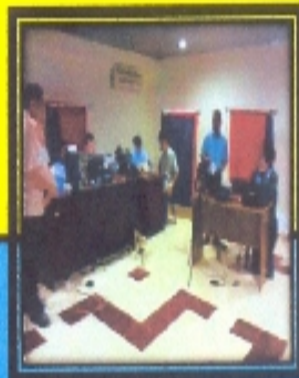


LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)

ASLI



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2013



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan dengan adanya LAKIP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan bagi para stakeholder untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Balikpapan, Januari 2014

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Balikpapan,

Drs. H. CHAIRIL ANWAR

Pembina Utama Muda
NIP. 19580926 198602 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
C. ASPEK DAN KEBIJAKAN	6
D. STRUKTUR ORGANISASI	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	10
1. VISI DAN MISI	10
2. TUJUAN DAN SASARAN	12
3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	13
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013	14
B. PENETAPAN KINERJA	15
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA	17
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	28
BAB IV PENUTUP	30
A. KESIMPULAN	30
B. SARAN	31
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
1. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);	
2. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013;	
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013.	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan Paradigma Pemerintahan ke arah Transparansi dan Pelayanan Masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan paradigma tersebut.

Sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa LAKIP juga diwajibkan bagi instansi di bawah Eselon II, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam memberikan Pelayanan pada masyarakat di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Wilayah Kota Balikpapan menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggungjawaban akuntabilitas.

Dalam Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah berusaha mencapai 5 (lima) sasaran, yaitu :

1. Tertib Administrasi dalam Penerbitan Akta Catatan Sipil.
2. Identitas Penduduk mendapatkan KTP.
3. Data Kependudukan yang akurat.
4. Tertib Administrasi dalam Penerbitan Dokumen Penduduk.
5. Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Sistem.

Dengan adanya LAKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mendukung terciptanya “Good Governance“ atau pemerintahan yang baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya Pelayanan Prima bagi Masyarakat.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Pengembangan Aparatur Negara diarahkan pada makin terwujudnya daya tanggap terhadap Aspirasi Rakyat dan Dinamika Perubahan Lingkungan dukungan Administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan Fungsi Penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam suatu Sistem Administrasi Negara yang makin handal, professional dan strategis.

Dalam merespon perubahan Lingkungan Strategis di setiap Instansi Pemerintah termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagai salah satu Perangkat Pemerintah Daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan melakukan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 pasal 24 sampai dengan pasal 27 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.



Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2009 pasal 3 dan pasal 4 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta Tugas Pembantuan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- b. Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Supervisi dan Konsultasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Jaringan Komunikasi Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- f. Perekaman Data Hasil Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemutakhiran Data Penduduk.
- g. Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan.
- h. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pengembangan Kualitas Penduduk dan Perlindungan Penduduk.
- i. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



C. ASPEK STRATEGIS.

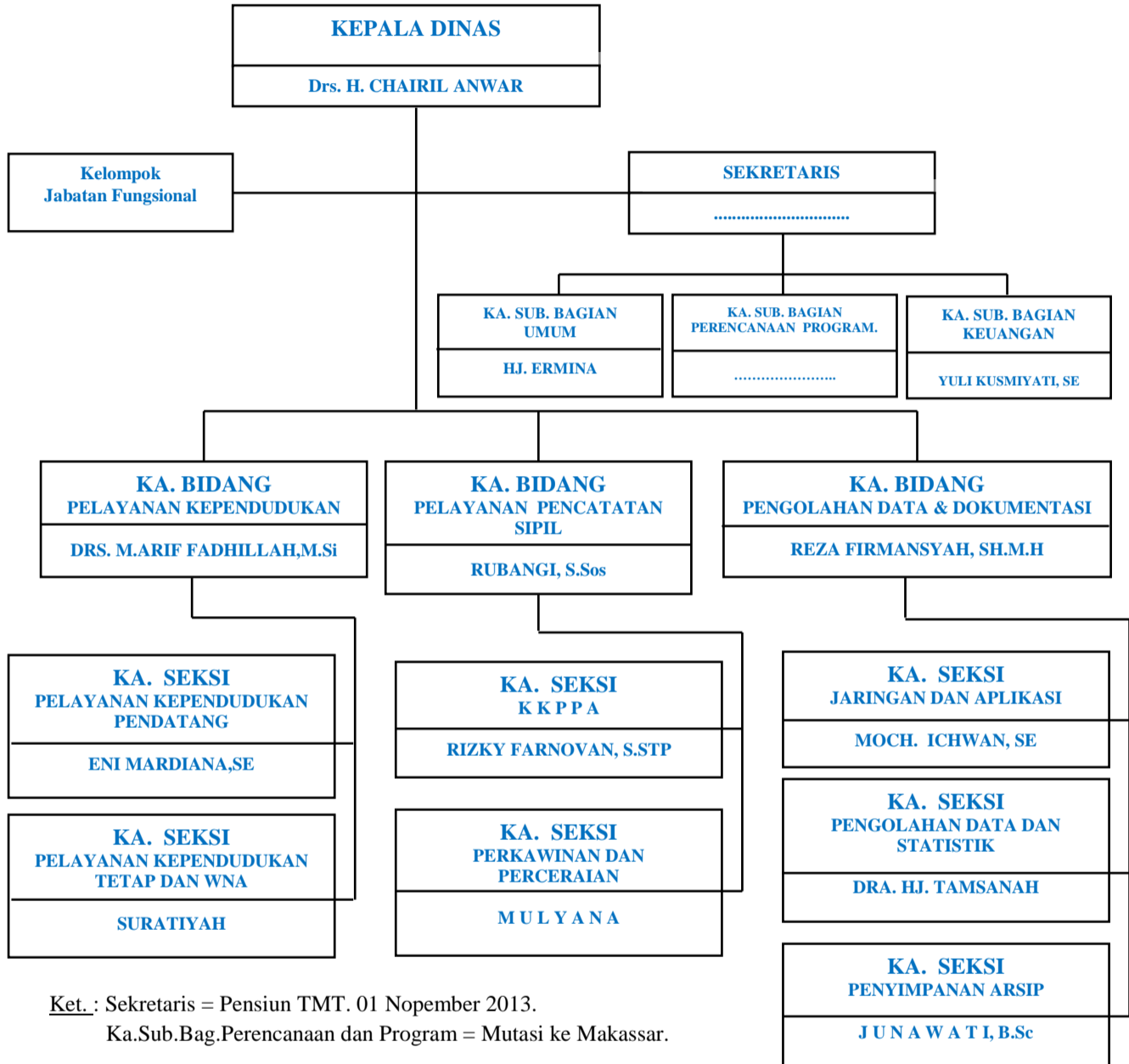
1. Tertib Administrasi dalam Penerbitan Akta Catatan Sipil :
 - 1.1. Jumlah Akte Kelahiran.
 - 1.2. Jumlah Akte Kematian.
 - 1.3. Jumlah Akte Perkawinan.
 - 1.4. Jumlah Akte Perceraian.
 - 1.5. Jumlah Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak.
 - 1.6. Jumlah Kutipan Akte Kelahiran.
 - 1.7. Jumlah Kutipan Akte Perubahan.
 - 1.8. Jumlah Kutipan Pengesahan Anak.
 - 1.9. Jumlah Pengangkatan Anak (Adopsi).
2. Identitas Penduduk mendapatkan KTP :
 - 2.1. Jumlah KTP WNI.
 - 2.2. Jumlah KTP WNA.
 - 2.3. Jumlah e-KTP.
3. Data Kependudukan yang akurat :
 - 3.1. Jumlah KK WNI.
 - 3.2. Jumlah KK WNA.
4. Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Sistem Kependudukan :
 - 4.1. Jumlah KTP Gratis.
 - 4.2. Jumlah KK Gratis.



D. STRUKTUR ORGANISASI.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Sumber : Perda Nomor 17 Tahun 2008



Ket.: Sekretaris = Pensiun TMT. 01 Nopember 2013.
Ka.Sub.Bag.Perencanaan dan Program = Mutasi ke Makassar.

**Sumber Daya Manusia.**

Rincian secara lengkap Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan per 31 Desember 2013.

Jabatan	Gol.				Pendidikan					
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ka.Bid.Pelayanan Kependudukan	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ka.Bid.Pelayanan Pencatatan	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ka.Bid.Pengolahan Data dan Dokuemntasi	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ka.Sub.Bag.Umum	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Ka.Sub.Bagian Perencanaan Program	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ka.Sub.Bagian Keuangan	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Ka.Seksi Pelayanan Kependudukan Pendetang	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Ka.Seksi K K P P A	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Ka.Seksi Perkawinan dan Perceraian	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Ka.Seksi Jaringan dan Aplikasi	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Ka.Seksi Pelayanan Kependudukan Tetap dan WNA	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Ka.Seksi Pengolahan Data dan Statistik	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Ka.Seksi Penyimpanan Arsip	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Pelaksana	-	5	19	1	-	2	6	17	-	-
Jumlah PNS	4	14	19	1	2	2	6	17	-	-
THL	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Naban	-	-	-	-	-	-	2	-	13	1
Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	2	2	28	-	-
Total	4	14	19	1	2	4	10	46	13	1

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebanyak 87 orang terdiri dari PNS 37 orang, CPNS 1 orang, THL 1 orang, Naban 16 orang dan Tenaga Kontrak 32 orang.



E. SISTEMATIKA PENULISAN.

BAB I PENDAHULUAN.

Berisi Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis, Struktur Organisasi dan Sistematika Penulisan.

BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENEMPATAN KINERJA.

Menjelaskan tentang Rencana Strategi (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

Menjelaskan tentang Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja dan Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP.

Berisikan Kesimpulan dan Saran untuk keperluan penerapan maupun pengembangan selanjutnya.

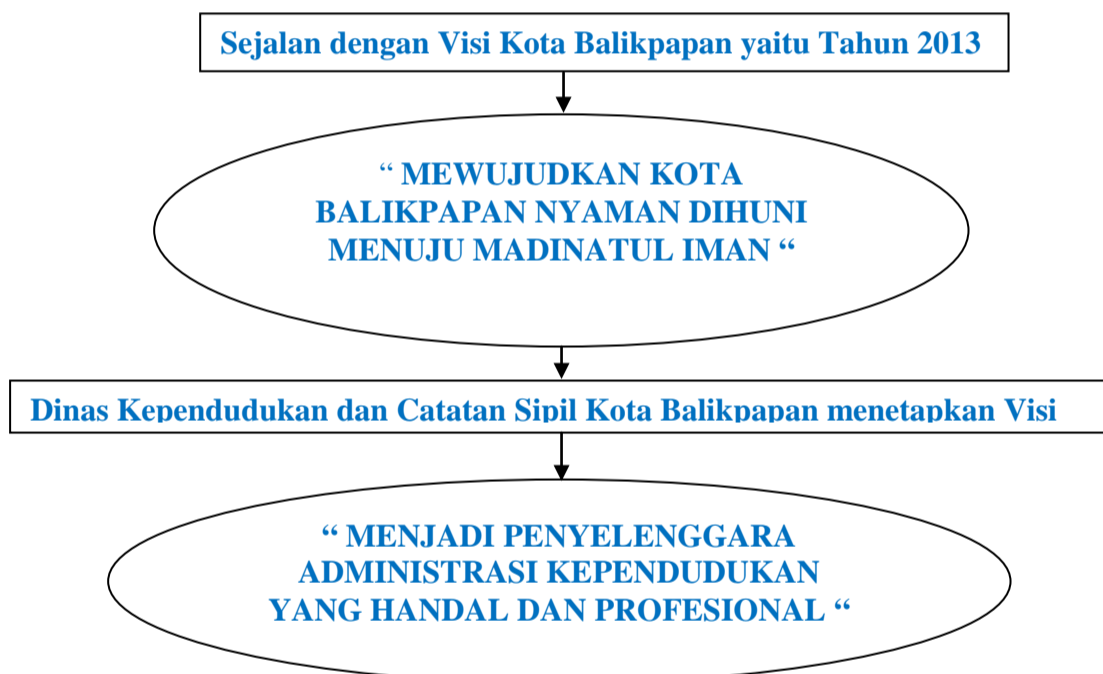
BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).

1. VISI DAN MISI.

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (challenge) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.



Penjelasan dari pada Visi Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Kota Nyaman Dihuni (Livable City) adalah : Suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi dll).



Prinsip-Prinsip Kota Nyaman Dihuni adalah :

- a. Tersedianya berbagai Kebutuhan Dasar Masyarakat Perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik).
- b. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (Transportasi Publik, Taman Kota, Fasilitas Kesehatan/Kesehatan/Ibadah).
- c. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi.
- d. Keamanan, bebas dari rasa takut.
- e. Mendukung Fungsi Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- f. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Madinatul Iman Sebagai Masyarakat (Civil Society) adalah :

- Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral.
- Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.
- Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religious dan berperadaban maju.

Penjelasan kata kunci visi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. **Handal** adalah Pelaporan Identitas / Dokumen Kependudukan yang berupa perubahan status dan peristiwa vital yang dialami berdasarkan prosedur yang benar dan tepat waktu.
2. **Profesional** adalah Pelayanan yang seefektif dan seefisien mungkin melalui prosedur yang ada dengan pelayanan yang ramah, cepat dan tepat waktu sehingga diharapkan masyarakat menjadi puas.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan.



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan menetapkan Misi yang diembannya, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- c. Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan, SDM dan Perkantoran.

2. TUJUAN DAN SASARAN.

Tujuan daripada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pelayanan Akta Capil.
2. Menyelenggarakan Pelayanan KTP.
3. Menyelenggarakan Pelayanan KK.
4. Menyelenggarakan Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
5. Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan, SDM dan Perkantoran.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Tertib Administrasi dalam Penerbitan Akta Catatan Sipil.
2. Identitas Penduduk mendapatkan KTP.
3. Data Kependudukan yang akurat.
4. Tertib Administrasi dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan.
5. Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Sistem Kependudukan.

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan Indikator Pencapaian Sasaran. Indikator sasaran ini antara lain digunakan untuk memudahkan Perhitungan Kinerja pada penyusunan LAKIP setiap tahunnya.



3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya yang diperlukan untuk meralisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah :

1. Meningkatkan kemampuan Profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.
2. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat agar mereka membuat Akte-akte Pencatatan Sipil dan mengurus KTP dan Kartu Keluarga (KK).
3. Menciptakan koordinasi dengan Dinas-dinas terkait agar tercapai target yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman, Pegangan atau Petunjuk dalam Pengembangan ataupun Pelaksanaan Program.

Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Memberikan kesempatan yang luas untuk Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Mengikutsertakan Masyarakat dalam Mensosialisasikan Masalah Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Memberikan Pelayanan Prima yang seefektif dan seefisien mungkin dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Mendata penduduk per RT.
5. Memberikan Data Kependudukan yang mutakhir.



4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013.

Yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2013 dengan Indikator dan Target Capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam Tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tertib Administrasi dalam Penerbitan Akta Catatan Sipil.	Akta-Akta Catatan Sipil : 1.1. Jumlah Akte Kelahiran. 1.2. Jumlah Akte Kematian. 1.3. Jumlah Akte Perkawinan. 1.4. Jumlah Akte Perceraian. 1.5. Jumlah Pengesahan dan Pengakuan Anak. 1.6. Jumlah Kutipan Akte Kelahiran. 1.7. Jumlah Kutipan Akte Perubahan. 1.8. Jumlah Kutipan Pengesahan Anak. 1.9. Jumlah Pengangkatan Anak (Adopsi).	15.390 144 273 20 191 502 169 7 7
2.	Identitas penduduk mendapatkan KTP.	Jumlah KTP yang diterbitkan : 2.1. Jumlah KTP WNI. 2.2. Jumlah KTP WNA. 2.3. Jumlah E-KTP (Perekaman).	141.486 501 50.000
3.	Data Kependudukan yang akurat.	Jumlah KK yang terbitkan : 3.1. Jumlah KK WNI. 3.2. Jumlah KK WNA.	70.915 752
4.	Tertib Administrasi dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan.	4.1. Jumlah Peraturan Daerah. 4.2. Jumlah Surat Keputusan. 4.3. ISO 9001-2008 dalam Pelayanan Akte Catatan Sipil.	0 0 0
5.	Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Sistem Kependudukan.	5.1. Jumlah KTP gratis. 5.2. Jumlah KK gratis. 5.3. Jumlah Penghargaan.	170.500 53.900 0



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 27 TAHUN 2010

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN / SUMBER DATA
1.	Tertib Administrasi dalam Penerbitan Akta Catatan Sipil.	Akta - Akta Catatan Sipil :	Rekapitulasi Hasil Kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
		1.1. Jumlah Akte Kelahiran.	
		1.2. Jumlah Akte Kematian.	
		1.3. Jumlah Akte Perkawinan.	
		1.4. Jumlah Akte Perceraian.	
		1.5. Jumlah Pengesahan dan Pengakuan Anak.	
		1.6. Jumlah Kutipan Akte Kelahiran.	
		1.7. Jumlah Kutipan Akte Perubahan.	
		1.8. Jumlah Kutipan Pengesahan Anak.	
1.9. Jumlah Pengangkatan Anak (Adopsi).			
2.	Identitas Penduduk mendapatkan KTP.	Jumlah KTP yang diterbitkan :	Rekapitulasi Hasil Kegiatan Bidang Pelayanan Kependudukan.
		2.1. Jumlah KTP WNI.	
		2.3. Jumlah KTP WNA.	
		2.4. Jumlah E-KTP (Perekaman).	
3.	Data Kependudukan yang akurat.	Jumlah KK yang diterbitkan :	Rekapitulasi Hasil Kegiatan Bidang Pelayanan Kependudukan.
		3.1. Jumlah KK WNI.	
		3.2. Jumlah KK WNA.	
4.	Tertib Administrasi dalam Penerbitan Dokumen.	4.1. Jumlah Peraturan Daerah.	
		4.2. Jumlah Surat Keputusan.	
		4.3. ISO 9001 : 2008 dalam Pelayanan Akte Pencatatan Sipil.	
5.	Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Sistem Kependudukan.	5.1. Jumlah KTP gratis.	Rekapitulasi Hasil Kegiatan Bidang Pelayanan Kependudukan dan Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi.
		5.2. Jumlah KK gratis.	
		5.3. Jumlah Penghargaan.	



C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6
1.	Tertib Administrasi dalam Penertiban Akta Pencatatan Sipil.	Akta – akta Pencatatan Sipil : 1.1. Jumlah Akte Kelahiran. 1.2. Jumlah Akte Kematian. 1.3. Jumlah Akte Perkawinan. 1.4. Jumlah Akte Perceraian. 1.5. Jumlah Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak. 1.6. Jumlah Kutipan Akte Kelahiran. 1.7. Jumlah Kutipan Akte Perubahan. 1.8. Jumlah Kutipan Pengesahan Anak. 1.9. Jumlah Pengangkatan Anak (Adopsi).	15.390 Akte. 144 Akte. 273 Akte. 20 Akte. 191 Akte. 502 Akte. 169 Akte. 7 Akte. 7 Akte.	Program Penataan Administrasi Kependudukan. 1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil. 2. Kegiatan Pemrosesan Akta-akta Pencatatan Sipil (Blanko-blanko). 3. Kegiatan Pelayanan Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Kelahiran	140.300.000 568.640.000 401.270.000
2.	Identitas Penduduk mendapatkan KTP.	Jumlah KTP yang diterbitkan : 2.1. Jumlah KTP WNI. 2.2. Jumlah KTP WNA. 2.3. Jumlah e-KTP (Perekaman).	141.486 KTP. 501 KTP. 50.000 Orang.	Program Penataan Administrasi Kependudukan. 1. Kegiatan Implementasi Sistem Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan). 2. Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan. 3. Kegiatan Pengadaan Blanko-blanko Kependudukan. 4. Kegiatan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP).	537.155.000 628.100.000 643.800.000 2.041.250.000
3.	Data Kependudukan yang akurat.	Jumlah KK yang diterbitkan : 3.1. Jumlah KK WNI. 3.2. Jumlah KK WNA.	70.915 KK. 752 KK.	Program Penataan Administrasi Kependudukan. 1. Kegiatan Penyesuaian Database Kependudukan untuk Kecamatan/Kelurahan Pemekaran. 2. Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Software dan Hardware Aplikasi SIAK.	710.754.600 335.800.000
4.	Tertib Administrasi dalam Penertiban Dokumen Kependudukan.	4.1. Jumlah Peraturan Daerah. 4.2. Jumlah Surat Keputusan. 4.3. Jumlah ISO 9001 : 2008 dalam Pelayanan Akte Pencatatan Sipil.	0 Perda. 0 SK. 0 ISO.	Program Penataan Administrasi Kependudukan. 1. Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Arsip Akte Catatan Sipil. 2. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Kota Balikpapan. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Kegiatan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan. 1. Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	120.30.000 42.475.000 10.000.000 2.194.115.000
5.	Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan.	5.1. Jumlah KTP Gratis. 5.2. Jumlah KTP Gratis. 5.3. Jumlah Penghargaan.	170.500 KTP. 53.900 KTP. 0 Piagam.	Program Penataan Administrasi Kependudukan. 1. Kegiatan Ribbon Colour Pencetak KTP. 2. Kegiatan Pendataan Penduduk Miskin Tahun 2013.	399.650.000 1.003.445.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA.

Evaluasi Kinerja dimulai dengan Pengukuran Kinerja yang mencakup Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja dengan menggunakan Formulir/Dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang dilanjutkan dengan Formulir/Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2013 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 5 sasaran yang ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik.

Pencapaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Sasaran 1 : Tertib Administrasi dalam Penertiban Akta Catatan Sipil.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan
1.	Akta-Akta Catatan Sipil :				Program Penataan Administrasi Kependudukan.
1.1.	Jumlah Akte Kelahiran.	15.390	15.390	98,67	1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil. 2. Kegiatan Pemrosesan Akta-akta Pencatatan Sipil (Blanko-blanko). 3. Kegiatan Pelayanan Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Kelahiran.
1.2.	Jumlah Akte Kematian.	144	367	254,86	
1.3.	Jumlah Akte Perkawinan.	273	330	120,88	
1.4.	Jumlah Akte Perceraian.	20	48	240,00	
1.5.	Jumlah Pengesahan dan Pengakuan Anak.	191	0	0,00	
1.6.	Jumlah Kutipan Akte Kelahiran.	502	684	136,25	
1.7.	Jumlah Kutipan Akte Perubahan.	169	78	46,15	
1.8.	Jumlah Kutipan Pengesahan Anak.	7	46	657,14	
1.9.	Jumlah Pengesahan Anak (Adopsi).	7	0	0	

1.1. **Akte Kelahiran** pada Tahun 2013 ditargetkan sejumlah **15.390 Akte** dan terealisasi **15.186 Akte** atau sebesar **98,67 %**. Hal ini dikarenakan besaran target adalah termasuk di dalamnya adalah cadangan apabila terjadi Peningkatan Jumlah Penduduk.

1.2. **Akte Kematian** pada Tahun 2013 ditargetkan sejumlah **144 Akte** dan terealisasi **367 Akte** atau sebesar **254,86 %**. Hal ini mengalami Kenaikan



dikarenakan Warga Masyarakat Kota Balikpapan antusias mengurus Akte Kematian untuk keperluan Ahli Waris.

- 1.3. **Akte Perkawinan** pada Tahun 2013 ditargetkan **273 Akte** dan terealisasi **330 Akte** atau sebesar **120,88 %**. Hal ini mengalami Kenaikan dikarenakan Warga Masyarakat Kota Balikpapan antusias mengurus Akte Perkawinan bagi beragama Non Muslim di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.
- 1.4. **Akte Perceraian** pada Tahun 2013 ditargetkan **20 Akte** dan terealisasi **48 Akte** atau sebesar **240,00 %**. Hal ini mengalami Kenaikan dikarenakan banyak permohonan untuk mengajukan perceraian sehingga mengalami peningkatan.
- 1.5. **Pengesahan dan Pengakuan Anak** ditargetkan **191 Akte** dan terealisasi **0 Akte** atau sebesar **0,00 %**. Tidak ada Warga Masyarakat Kota Balikpapan yang mengurus, sehingga realisasinya NIHIL. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan Pengesahan dan Pengakuan Anak, masyarakat terlebih dahulu mengesahkan perkawinannya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri setempat.
- 1.6. **Kutipan Akte Kelahiran** ditargetkan **502 Akte** dan terealisasi **684 Akte** atau sebesar **136,25 %**. Hal ini dikarenakan adanya Warga Masyarakat Kota Balikpapan yang melaporkan bahwa Akte Kelahirannya rusak, hilang dan melaporkan ke Kepolisian untuk dibuatkan Kutipan Akte Kelahiran.
- 1.7. **Kutipan Akte Perubahan** ditargetkan **169 Akte** dan terealisasi **78 Akte** atau sebesar **46,15 %**. Hal ini mengalami dikarenakan Jumlah Permohonan Perubahan tidak dapat diprediksi tetapi berdasarkan keperluan masyarakat.
- 1.8. **Kutipan Pengesahan Anak** ditargetkan **7 Akte** dan terealisasi **46 Akte** atau sebesar **657,14 %**. Hal ini dikarenakan kesadaran Masyarakat tentang Pengesahan Anak yang dilahirkan sebelum Terbit Surat Nikah untuk disyahkan.



1.9. **Pengangkatan Anak (Adopsi)** untuk Tahun 2013 ditargetkan **7 Akte** dan terealisasi **0 Akte** atau sebesar **0,00 %**. Hal ini dikarenakan tidak ada Warga Masyarakat Kota Balikpapan yang mengurus, sehingga realisasinya **NIHIL**.

Perbandingan Pencapaian per Sasaran Strategis, jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2012 dan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Tertib Administrasi dalam Penertiban Akta Catatan Sipil.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2012		Tahun 2013	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Tertib Administrasi dalam Penerbitan Akta Catatan Sipil.	Akta-Akta Catatan Sipil :				
		1.1. Jumlah Akte Kelahiran.	13.991	34.853	15.390	15.186
		1.2. Jumlah Akte Kematian.	131	250	144	367
		1.3. Jumlah Akte Perkawinan.	248	319	273	330
		1.4. Jumlah Akte Perceraian.	18	22	20	48
		1.5. Jumlah Pengesahan dan Pengakuan Anak.	174	5	191	0
		1.6. Jumlah Kutipan Akte Kelahiran.	239	421	502	684
		1.7. Jumlah Kutipan Akte Perubahan.	154	231	169	78
		1.8. Jumlah Kutipan Pengesahan Anak.	5	0	7	46
1.9. Jumlah Pengangkatan Anak (Adopsi).	5	0	7	0		

Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2012 dan Tahun 2013 untuk Tertib Administrasi dalam Penerbitan Akta Catatan Sipil sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah Penerbitan Akte Kelahiran, Kematian dan Perkawinan dikarenakan warga sudah mulai melaksanakan tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, hal ini juga didukung melalui adanya Kegiatan Sosialisasi pada setiap Kelurahan di Kota Balikpapan.
2. Meningkatnya Perkawinan disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974, usia menikah 21 tahun untuk pria, dan untuk wanita usia 19 tahun, karena kesadaran akan pentingnya Akte Perkawinan sehingga masyarakat antusias ingin mendaftar dan ingin dicapai secara Negara sehingga perkawinan mereka syah dimata hukum.



3. Kesadaran masyarakat dalam memiliki Akte Perceraian, disebabkan karena kebutuhan kelengkapan Administrasi.
4. Penurunan Jumlah Pengesahan dan Pengakuan Anak dikarenakan Warga Kota Balikpapan semakin tertib dalam melaporkan Peristiwa Perkawinannya sehingga Jumlah Anak yang lahir dikarenakan perkawinan yang sah berkurang.
5. Peningkatan Penerbitan Kutipan Akte Perubahan peristiwa penting disebabkan karena adanya berbagai kepentingan Administrasi yang mengharuskan para pemohon menyelesaikan data yang ada pada Akte-akte Pencatatan Sipil nya.

Sasaran 2 : Identitas Penduduk mendapatkan KTP.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan
2.	Jumlah KTP yang diterbitkan : 2.1. Jumlah KTP WNI. 2.2. Jumlah KTP WNA. 2.3. Jumlah e-KTP (Perekaman)	141.486 501 50.000	90,830 458 368.487	64,20 91,42 736,97	Program Penataan Administrasi Kependudukan. 1. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan). 2. Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan. 3. Kegiatan Pengadaan Blanko-blanko Kependudukan. 4. Kegiatan Penerapan KTP elektronik (e-KTP).

Identitas Penduduk mendapatkan KTP sangat penting. Oleh karena itu setiap penduduk yang akan menetap / berdomisili tempat tinggal di Kota Balikpapan harus memiliki KTP Kota Balikpapan. Setelah masa berlaku berakhir, maka warga masyarakat dapat memasukkan berkas permohonannya untuk mendapatkan KTP tetap di Kota Balikpapan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya pada **Bulan Juni Tahun 2012** sejak dilaksanakan penerapan e-KTP di Kota Balikpapan, maka tidak diterbitkan lagi KTPS bagi penduduk pendatang, namun untuk penduduk pendatang yang ingin menetap di Kota Balikpapan setelah mendapatkan surat pindah dari daerah asal dan telah dilaporkan pada RT dan Kelurahan sesuai dengan domisili tempat tinggal.



Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan akan mengeluarkan Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga (SPPKK) untuk WNI dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk WNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1. Jumlah KTP WNI pada Tahun 2013 ditargetkan **141.486 KTP** dan terealisasi **90.803 KTP** atau sebesar **64,20 %**.

Hal ini mengalami Penurunan dikarenakan Warga Masyarakat Kota Balikpapan tidak memperpanjang KTP Balikpapan sehingga menunggu diterbitkannya KTP Elektronik (e-KTP) yang dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri.

2.2. Jumlah KTP WNA pada Tahun 2013 ditargetkan **501 KTP** dan terealisasi **458 KTP** atau sebesar **91,42 %**. Penurunan yang terjadi karena Warga Negara Asing yang ada di Kota Balikpapan banyak yang tidak lagi memperpanjang masa kerja dan ijin tinggalnya di Balikpapan untuk kemudian kembali ke negaranya masing-masing.

2.3. Untuk Kegiatan Penerapan / Perekaman KTP Elektronik (e-KTP) pada Bulan Juni Tahun 2012 s/d Bulan Desember 2013 telah dilakukan perekaman KTP Elektronik di Kota Balikpapan secara Nasional.

Tahun 2013 perekaman KTP Elektronik di Kota Balikpapan secara Nasional ditargetkan **50.000 Orang** dan terealisasi **368.487 Orang** atau sebesar **736,97 %**.

Dan Warga Masyarakat Kota Balikpapan yang sudah menerima KTP Elektronik (e-KTP) Tahun 2013 sebanyak **348.577 KTP**.



Perbandingan Pencapaian per Sasaran Strategis, jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2012 dan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

2. Identitas Penduduk mendapatkan KTP.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2012		Tahun 2013	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.	Identitas penduduk mendapatkan KTP.	Jumlah KTP yang diterbitkan : 1.1. Jumlah KTP WNI. 1.2. Jumlah KTPS WNA 2.2. Jumlah KTP WNA. 2.3. Jumlah E-KTP (Perekaman).	128.624 323 455 410.000	108.593 531 1 351.736	141.486 0 501 50.000	90.830 0 458 368.487

Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2012 dan Tahun 2013 untuk Identitas Penduduk mendapatkan KTP tidak melampaui target, dikarenakan pada Bulan Juni Tahun 2012 telah dilaksanakan perekaman e-KTP (KTP elektronik) di Kota Balikpapan. Pada akhir Tahun 2012 pencetakan KTP manual tidak mencapai target karena sebagian besar masyarakat telah memiliki e-KTP. Untuk KTPS WNA sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 KTPS WNA telah diubah menjadi SKTT, maka tidak diterbitkan lagi KTPS bagi penduduk pendatang, namun untuk penduduk pendatang yang ingin menetap di Kota Balikpapan setelah mendapatkan Surat Pindah dari daerah asal dan telah melaporkan pada RT dan Kelurahan sesuai dengan domisili tempat tinggal. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan akan mengeluarkan Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga (SPPKK) untuk WNI dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk WNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Sasaran 3 : Data Kependudukan yang akurat.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan
3.	Jumlah KK yang diterbitkan :				Program Penataan Administrsi Kependudukan.
	3.1. Jumlah KK WNI.	70.915	105.231	148,40	1. Kegiatan Penyesuaian Database Kependudukan untuk Kecamatan/Kelurahan.
	3.2. Jumlah KK WNA.	752	114	15,16	2. Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Software dan Hardware Aplikasi SIAK.

Data Kependudukan yang akurat merupakan Data Kependudukan yang dilaporkan setiap bulannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Oleh karena itu setiap Penduduk Kota Balikpapan diharuskan wajib memiliki Dokumen Kependudukan. Bahwa setiap warga masyarakat diharuskan memiliki Kartu Keluarga bagi penduduk yang sudah menetap di Kota Balikpapan.

3.1. Jumlah KK WNI pada Tahun 2013 ditargetkan **70.915 KK** dan terealisasi **105.241 KK** atau sebesar **148,40 %**. Kenaikan yang terjadi karena adanya Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan.

3.2. Jumlah KK WNA pada Tahun 2013 ditargetkan **752 KK** dan terealisasi **114 KK** atau sebesar **15,16 %**. Penurunan yang terjadi karena Warga Negara Asing yang ada di Kota Balikpapan banyak yang tidak lagi memperpanjang masa kerja dan ijin tinggalnya di Balikpapan untuk kemudian kembali ke negaranya masing-masing.



Perbandingan Pencapaian per Sasaran Strategis, jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2012 dan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

3. Identitas Penduduk mendapatkan KTP.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2012		Tahun 2013	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.	Data Kependudukan yang akurat.	Jumlah KK yang terbitkan : 3.1. Jumlah KK WNI. 3.2. Jumlah KK WNA.	64.468 684	54.533 2	70.915 752	105.241 114

Pencapaian Sasaran Strategis untuk Data Kependudukan yang akurat Tahun 2012 tidak melampaui target dan Tahun 2013 melampaui target.

Sejak diberlakukannya Penerapan e-KTP (KTP elektronik) pada Bulan Juni Tahun 2012 untuk KKS tidak diterbitkan lagi diakibatkan mengalami penurunan.

Tahun 2013 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Walikota Balikpapan tentang Administrasi Kependudukan, yang di dalamnya mengatur tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang berlaku di Kota Balikpapan dan pemekaran Kecamatan dan Kelurahan mengalami kenaikan. Untuk KK WNI mengalami penurunan yang terjadi karena Warga Negara Asing yang ada di Kota Balikpapan banyak yang tidak lagi memperpanjang masa kerja dan ijin tinggalnya di Balikpapan untuk kemudian kembali ke negaranya masing-masing.

Sasaran 4 : Tertib Administrasi dalam Penertiban Dokumen Kependudukan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan
4..	4.1. Jumlah Peraturan Daerah. 4.2. Jumlah Surat Keputusan. 4.3. ISO 9001-2008 dalam Pelayanan Akte Catatan Sipil.	0 0 0	0 27 0	100 270 100	Program Penataan Administrasi Kependudukan. 1. Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Arsip Akte Catatan Sipil. 2. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Kota Balikpapan.



Sasaran Strategis **Tertib Administrasi dalam Penertiban Dokumen Kependudukan** pada Target yang ditetapkan **RENSTRA** per Indikator adalah 0 hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan mengacu kepada Peraturan Meteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia dan selama tidak adanya perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Permendagri, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tetap akan mengacu Peraturan yang lama, dalam pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagai berikut :

- 4.1. Jumlah Peraturan Daerah realisasi sebesar 100 %.
- 4.2. Jumlah Surat Keputusan realisasi sebesar 270 %.
- 4.3. ISO 9001-2008 dalam Pelayanan Akte Catatan Sipil realisasi sebesar 100 %.

Perbandingan Pencapaian per Sasaran Strategis, jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2012 dan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

4. Tertib Administrasi dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2012		Tahun 2013	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.	Tertib Administrasi dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan.	4.1. Jumlah Peraturan Daerah. 4.2. Jumlah Surat Keputusan. 4.3. ISO 9001-2008 dalam Pelayanan Akte Catatan Sipil.	1 1 0	1 0 0	0 0 0	0 27 0

Pencapaian Sasaran Strategis untuk Tertib Administrasi dalam Penertiban Dokumen Kependudukan Tahun 2012 dan Tahun 2013, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 dan 27 buah Surat Keputusan (SK) Walikota Balikpapan tentang Administrasi Kependudukan, yang di dalamnya mengatur tentang Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di Kota Balikpapan.



Sasaran 5 : Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Sistem Kependudukan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan
5	5.1. Jumlah KTP Gratis. 5.2. Jumlah KK Gratis. 5.3. Jumlah Penghargaan.	170.500 53.900 0	84.803 105.241 1	49,74 195,25 100	Program Penataan Administrsi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2013 bahwa pembuatan KTP tidak dipungut biaya sesuai dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah kecuali Pembuatan KTP percepatan dan KK tidak dipungut biaya.

5.1.Jumlah **KTP gratis** Tahun 2013 ditargetkan **170.500 KTP** dan terealisasi **84.803 KTP** atau sebesar **49,74 %**.

5.2.Jumlah **KK gratis** Tahun 2013 ditargetkan **53.900 KK** dan terealisasi **105.241 KK** atau sebesar **195,25 %**.

5.3.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan Panji Keberhasilan Se-Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2013 mendapat Piagam Penghargaan Terbaik II Bidang Administrasi Kependudukan Kategori Kota.

Perbandingan Pencapaian per Sasaran Strategis, jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2012 dan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

5. Tertib Administrasi dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2012		Tahun 2013	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.	Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Sistem Kependudukan.	5.1. Jumlah KTP gratis. 5.2. Jumlah KK gratis. 5.3. Jumlah Penghargaan.	155.000 49.000 1	103.350 54.533 1	170.500 53.900 0	84.803 105.241 1



Pencapaian Sasaran Strategis untuk Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Sistem Kependudukan Tahun 2012 dan Tahun 2013. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2012 mulai menggratiskan Pembuatan KTP dan KK bagi masyarakat Kota Balikpapan yang akan mengurus KTP dan KK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dan diberlakukan mulai Bulan Januari Tahun 2012.

Hasilnya di Tahun 2013 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan memperoleh Penghargaan sebagai Terbaik II Pengelola Bidang Administrasi Kependudukan Kategori Kota Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.



B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Dalam rangka pencapaian Kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam Tahun 2013 dialokasikan dan Anggaran Belanja Administrasi Umum, Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Anggaran Belanja Modal.

Anggaran tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan . Adapun besarnya anggaran yang tertuang tersebut adalah :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Reliasasi Tahun 2013	Sisa Anggaran	% Pencapaian Target
1.	Belanja Tidak Langsung	4.088.867.000	3.336.619.167	752.247.833	81,60
2.	Belanja Langsung	11.731.606.600	7.689.675.347	4.041.931.253	65,55
	Jumlah Belanja	15.820.473.600	11.026.294.514	4.794.179.086	69,70

Untuk penyerapan Target Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2013, untuk Belanja Langsung Realisasi Fisik telah mencapai **78 %** dan Belanja Langsung Realisasi Keuangan mencapai **65,55 %**.

Untuk Realisasi Keuangan pada Tahun 2013 yakni Belanja Langsung Realisasi hanya mencapai **65,55%**, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tahun 2013 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tidak menganggarkan Belanja Listrik dan Air secara keseluruhan sudah tercover di gedung Squash Balikpapan.
Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan nantinya akan menempati Gedung Baru sambil menunggu Peresmian.
2. Adanya kegiatan yang sudah di lelang, setelah melalui proses penawaran mengalami penurunan harga sehingga sisa dana yang ada di Silpaikan.
3. Perubahan Anggaran untuk Percetakan KTP Elektronik (e-KTP) dialokasikan ke kegiatan lain, yang mempengaruhi Silpa.
4. Penghematan dimana Anggaran tidak direalisasikan dengan digabungkan kegiatan lain.
5. Silpa Hasil Negosiasi Harga.



Realisasi Keuangan Belanja Langsung berdasarkan **Sasaran Strategis** Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
1.	Tertib Administrasi dalam Penertiban Akta Catatan Sipil.	1.110.210.000	750.344.975	67,59
2.	Identitas Penduduk mendapatkan KTP.	3.850.305.000	3.015.605.138	78,32
3.	Data Kependudukan yang akurat.	1.046.554.600	687.992.500	65,74
4.	Tertib Administrasi dalam Penertiban Dokumen kependudukan.	2.366.980.000	1.214.702.000	51,32
5.	Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Sistem Kependudukan.	1.403.095.000	638.755.000	45,52

Capaian Realisasi Keuangan Sasaran Strategis (1) sampai dengan (5) tidak sesuai dengan target dikarenakan :

1. Adanya kegiatan yang sudah di LELANG, setelah melalui proses Penawaran dan Negosiasi Harga mengalami penurunan harga sehingga sisa dana yang ada menjadi Silpa.
2. Perubahan Anggaran untuk Percetakan KTP Elektronik (e-KTP) dialokasikan ke kegiatan lain, yang mempengaruhi Silpa.
3. Penghematan dimana Anggaran tidak direalisasikan dengan digabungkan kegiatan lain.
4. Jumlah Rencana Anggaran pemberian Honorarium lebih besar dari SK.Walikota Balikpapan
5. Penghematan biaya (biaya rapat tidak direalisasikan) adanya Perubahan Peraturan Dispensasi Pembuatan Akta dengan tidak melalui Pengadilan Negeri.
6. Penghematan biaya (penggunaan ATK sesuai kebutuhan).
7. Tidak terealisasi kegiatan salah satu kegiatan karena berlakunya Sistem Kinerja Pegawai.
8. Pada akhir tahun ada pekerjaan yang belum terselesaikan.
9. Masih terdapatnya stock ATK dan barang Cetak sehingga tidak direalisasikan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan “Good Corporate Governance” dan “Clear Government” yang melibatkan stakeholder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam melakukan pengukuran kinerja keberhasilan dalam pencapaian target ini ditunjang oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Motivasi kerja yang tinggi dari staf;
- b. Kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pimpinan dan Staf serta terjalinnya kerjasama yang baik antar bidang.
- c. Rencana Kerja yang jelas dan terarah.
- d. Koordinasi yang sangat harmonis dengan Dinas / Instansi terkait termasuk Kelurahan dan Kecamatan.



Selain dari penunjang keberhasilan yang telah dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tersebut diatas, juga tidak lepas dari kendala-kendala yang ada. Diantaranya adalah :

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) :
 - a. Belum optimal Pendidikan dan Pelatihan bagi staf untuk meningkatkan profesionalisme;
 - b. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam menghadapi kendala-kendala yang ada :

- a. Meningkatkan disiplin dan Pelatihan Pegawai.
- b. Meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam hal mengurus Akta-akta Catatan Sipil, KTP, dan KK melalui Workshop, Sosialisasi dan media cetak (Surat Kabar).
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan.
- d. Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait termasuk Kelurahan dan Kecamatan Se-Balikpapan.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Masyarakat agar diadakan Pelatihan dan Kursus Pelayanan. Begitu pula bagi Pegawai yang mengelola masalah Keuangan dan Aset Kantor agar frekwensi Pelatihan atau penyegaran terhadap aturan-aturan Keuangan lebih ditingkatkan.



Dan akhirnya Laporan LAKIP ini dapat disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat. Terima Kasih.

Balikpapan, Januari 2014
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Balikpapan,

Drs. H. CHAIRIL ANWAR
NIP. 19580926 198602 1 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. Syarifuddin Yoes RT.061 No.01 telp. (0542) 758135-7581357- 7581368 Fax-(0542) 7581363

(Gedung Squash Indoor Kota Balikpapan)

BALIKPAPAN 76114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 970 / / DISDUKCAPIL / 2013

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang** :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 yang memuat dalam RESTRA Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RESTRA Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016, maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
10. Perda Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indicator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Tertib Administrasi dalam Penerbitan Akta Catatan Sipil.	Akta-Akta Catatan Sipil : 1.1. Jumlah Akte Kelahiran. 1.2. Jumlah Akte Kematian. 1.3. Jumlah Akte Perkawinan. 1.4. Jumlah Akte Perceraian. 1.5. Jumlah Pengesahan dan Pengakuan Anak. 1.6. Jumlah Kutipan Akte Kelahiran. 1.7. Jumlah Kutipan Akte Perubahan. 1.8. Jumlah Kutipan Pengesahan Anak. 1.9. Jumlah Pengangkatan Anak (Adopsi).	Disdukcapil
2.	Identitas penduduk mendapatkan KTP.	Jumlah KTP yang diterbitkan : 2.1. Jumlah KTP WNI. 2.2. Jumlah KTP WNA. 2.3. Jumlah E-KTP.	Disdukcapil
3.	Data Kependudukan yang akurat.	Jumlah KK yang terbitkan : 3.1. Jumlah KK WNI. 3.2. Jumlah KK WNA.	Disdukcapil
4.	Tertib Administrasi dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan.	4.1. Jumlah Peraturan Daerah. 4.2. Jumlah Surat Keputusan. 4.3. ISO 9001-2008 dalam Pelayanan Akte Catatan Sipil.	Disdukcapil
5.	Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Sistem Kependudukan.	5.1. Jumlah KTP gratis. 5.2. Jumlah KK gratis. 5.3. Jumlah Penghargaan.	Disdukcapil

Pasal 2

Unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 20 Mei 2013

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Balikpapan

Drs. H. Chairil Anwar
NIP. 19580926 198602 1 002

PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Unit Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tertib Administrasi dalam Penertiban Akta Catatan Sipil.	Akta - Akta Catatan Sipil : 1.1. Jumlah Akte Kelahiran. 1.2. Jumlah Akte Kematian. 1.3. Jumlah Akte Perkawinan. 1.4. Jumlah Akte Perceraian. 1.5. Jumlah Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak. 1.6. Jumlah Kutipan Akte Kelahiran. 1.7. Jumlah Kutipan Akte Perubahan. 1.8. Jumlah Kutipan Pengesahan Anak. 1.9. Jumlah Pengangkatan Anak (Adopsi).	15.390 Akte. 144 Akte. 273 Akte. 20 Akte. 191 Akte. 502 Akte. 169 Akte. 7 Akte. 7 Akte.	15.186 Akte. 367 Akte. 330 Akte. 48 Akte. 0 Akte. 684 Akte. 78 Akte. 46 Akte. 0 Akte.	98,67 254,86 120,88 240,00 0,00 136,25 46,15 657,14 0,00	Program Penataan Administrasi 1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil. 2. Kegiatan Pemrosesan Akta-akta Pencatatan Sipil (Blanko-blanko). 3. Kegiatan Pelayanan Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Kelahiran.	140.300.000 568.640.000 401.270.000	115.031.100 469.101.775 166.212.100	81,99 82,50 41,42	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan
2.	Identitas Penduduk mendapatkan KTP.	Jumlah KTP yang diterbitkan : 2.1. Jumlah KTP WNI. 2.2. Jumlah KTP WNA. 2.3. Jumlah e-KTP (Perekaman).	141.486 KTP. 501 KTP. 50.000 Orang.	90.830 KTP. 458 KTP. 368.487 Orang.	64,20 91,42 736,97	Program Penataan Administrasi 1. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan). 2. Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan. 3. Kegiatan Pengadaan Blanko-blanko Kependudukan. 4. Kegiatan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP).	537.155.000 628.100.000 643.800.000 2.041.250.000	410.580.000 474.500.000 480.769.975 1.649.755.163	76,44 75,55 74,68 80,82	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan
3.	Data Kependudukan yang akurat.	Jumlah KK yang diterbitkan : 3.1. Jumlah KK WNI. 3.2. Jumlah KK WNA.	70.915 KK. 752 KK.	105.241 KK. 114 KK.	148,40 15,16	Program Penataan Administrasi 1. Kegiatan Penyesuaian Database Kependudukan untuk Kecamatan/Kelurahan Pemekaran. 2. Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Software dan Hardware Aplikasi SIAK.	710.754.600 335.800.000	498.850.000 189.142.500	70,19 56,33	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Unit Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Tertib Administrasi dalam Penertiban Dokumen Kependudukan.	4.1. Jumlah Peraturan Daerah. 4.2. Jumlah Surat Keputusan. 4.3. Jumlah ISO 9001 : 2008 dalam Pelayanan Akte Pencatatan Sipil.	0 Perda. 0 SK. 0 ISO.	0 Perda. 27 SK. 0 ISO.	100 270 100	Program Penataan Administrasi 1. Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Arsip Akte Catatan Sipil. 2. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Kota Balikpapan.	120.390.000 42.475.000	83.167.000 21.880.000	69,08 51,51	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan
5.	Citra Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Sistem Kependudukan.	5.1. Jumlah KTP Gratis. 5.2. Jumlah KK Gratis. 5.3. Jumlah Penghargaan.	170.500 KTP. 53.900 KK. 0 Piagam.	84.803 KTP. 105.241 KK. 1 Piagam.	49,74 195,25 100,00	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	399.650.000	7.350.000	1,84	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan

**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Balikpapan**

**Drs. H. CHAIRIL ANWAR
NIP.19580926 198602 1 002**

6.569.584.600 4.566.339.613